NOTULENSI AUDIENSI DAN KOORDINASI STRATEGIS

Tim Analisis dan Komunikasi Strategis Independen Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

I. Informasi Umum Rapat

• Agenda: Audiensi, Koordinasi Strategis, dan Input Data Terkait Inovasi serta Digitalisasi OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

• Pihak Terkait: Tim Analisis dan Komunikasi Strategis Independen (Dr. H. Anwar Hafid, M.Si) dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran.

• Fokus Utama: Sinkronisasi data pariwisata, inovasi digital pelayanan publik, konektivitas destinasi, serta penanganan hambatan koordinasi lintas daerah.

II. Pengelolaan Data & Digitalisasi Pariwisata

• Komitmen Pimpinan: Dinas Pariwisata secara konsisten menjalankan instruksi Gubernur Sulawesi Tengah secara langsung, baik dalam aspek inovasi pelayanan maupun tata kelola data pariwisata, meskipun terkadang terdapat tantangan terkait political will di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

• Pengelolaan Destinasi & Desa Wisata:
- Dinas telah memaksimalkan pendataan destinasi wisata yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
- Untuk data Desa Wisata, Dinas terintegrasi langsung dengan sistem data Kementerian melalui platform Jadesta (Jaringan Desa Wisata).

• Kompleksitas Data: Pengelolaan data pariwisata di Sulawesi Tengah memerlukan pendekatan khusus mengingat karakteristik wilayah yang terbagi dalam klaster-klaster wisata tertentu.

III. Metodologi Penghitungan Kunjungan & Ekonomi Kreatif (Ekraf)

• Ekonomi Kreatif (Ekraf) & PDRB Pariwisata:
- Penghitungan kontribusi PDRB Pariwisata dan sektor Ekraf dilakukan bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad).

- Cakupan mencakup jasa usaha pariwisata serta industri pengolahan terkait (seperti kriya, furnitur, produk kayu, dan lainnya).

- Data Kunjungan Wisatawan:
  - Wisatawan Domestik (2025): Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
  - Wisatawan Mancanegara: Menggunakan kombinasi data BPS dan data Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.
  - Catatan Kritis Data Mancanegara: Standar BPS umumnya hanya menghitung wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang. Padahal, banyak destinasi unggulan (seperti Wisata Paisupok di Banggai Kepulauan) tidak memiliki hotel berbintang. Oleh karena itu, Dinas menghimpun data dari kabupaten/kota yang mencakup wisatawan tipe backpacker maupun yang menginap di homestay.

- Sebaran Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tertinggi:
  1. Kabupaten Banggai Kepulauan (Paisupok)
  2. Kabupaten Banggai
  3. Kabupaten Tojo Una-Una
  4. Kota Palu
  5. Kabupaten Banggai Laut

IV. Strategi Konektivitas, Atraksi, dan Pengembangan Wisata

• Konektivitas Transportasi: Daya tarik atraksi wisata sangat bergantung pada kelancaran akses darat, laut, dan udara. Dinas bekerja sama langsung dengan biro perjalanan (travel agents) untuk memasarkan paket wisata.

• Analisis Nilai Ekonomi Wisatawan: Berdasarkan data perjalanan, rata-rata pengeluaran wisatawan di daerah tertentu (seperti Banggai) dapat mencapai lebih dari Rp2.000.000 per orang/hari.

• Intervensi Lintas Sektoral: Kebijakan terkait biaya transportasi (seperti tarif kapal) berada di luar kewenangan langsung Dinas Pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas OPD agar intervensi konektivitas memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

• Agenda Terdekat: Dinas Pariwisata akan segera menggelar Rapat Kerja (Raker) khusus untuk membahas pemenuhan kebutuhan wisatawan secara komprehensif, meliputi konektivitas, akomodasi penginapan, hingga suvenir.

• Contoh Kasus Pemberdayaan Lokal (Paisupok): Pengelolaan kawasan wisata diarahkan untuk menghidupkan sektor pendukung seperti penyewaan kendaraan (rental mobil) dan penyediaan penginapan lokal guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitar.

V. Inovasi Layanan Digital Dinas Pariwisata

Sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi pemerintahan, Dinas Pariwisata telah meluncurkan dan mengoptimalkan beberapa inovasi aplikasi:

1. Berani Kaimo: Aplikasi berbasis web (tersedia tautan dan unduhan via Play Store) yang memuat direktori lengkap berbagai destinasi wisata di Sulawesi Tengah.

2. Cekidot: Aplikasi internal untuk melakukan penilaian kinerja pegawai secara langsung.

3. Srikandi: Aplikasi persuratan elektronik untuk efisiensi administrasi internal instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

VI. Hambatan Koordinasi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Poso)

• Kasus Penetapan Geopark Danau Poso: Terdapat kendala birokrasi di mana proses penetapan status Geopark Danau Poso belum berjalan optimal (less smooth). Meskipun hal ini seharusnya dapat dieksekusi di tingkat provinsi, realisasinya terkendala karena Pemerintah Kabupaten Poso (Bupati) belum menerbitkan rekomendasi dan penetapan resmi.

• Urgensi: Penetapan resmi ini sangat krusial untuk mendorong sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi wilayah tersebut.

VII. Kesimpulan & Komitmen Tindak Lanjut

Pada prinsipnya, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmen penuh untuk terus mensupport dan menindaklanjuti segala bentuk instruksi Gubernur dalam rangka mengoptimalkan potensi pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.